



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERINGATI HSN 2025, WABUP SIDOARJO BERSAMA SELURUH ASN GELAR TABLIGH AKBAR DI MASJID AGUNG

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Susana khidmat menyelimuti Masjid Agung Sidoarjo pada Jumat (31/10/2025). Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2025.

Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan HSN di Sidoarjo, yang kali ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antara nilai-nilai kesantrian dengan etos kerja aparatur negara.

Peringatan HSN 2025 ini mengusung tema "Santri Sehat Jiwa Raga, ASN



Produktif Untuk Peradaban Dunia". Tema ini menjadi fokus utama dalam tausiyah dan sambutan yang disampaikan.

Dalam sambutannya di hadapan ribuan ASN yang memadati masjid, Wabup Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan ro-

hani sebagai fondasi utama produktivitas.

"Tema tahun ini sangat relevan. Santri adalah simbol ketekunan belajar, kekuatan spiritual, dan kesehatan jiwa. ASN, sebagai pelayan masyarakat, juga dituntut memiliki hal yang sama," ujarnya.

Beliau menekankan bahwa seorang ASN tidak

cukup hanya sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara mental dan spiritual. Kesehatan jiwa raga inilah yang akan melahirkan ASN yang produktif, inovatif, dan berintegritas.

"Jika ASN sehat jiwa dan raganya, seperti semangat yang dimiliki para santri, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Produktivitas kita sebagai abdi negara akan meningkat, dan ini adalah kontribusi nyata Sidoarjo untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik," tegasnya.

Tabligh Akbar ini, lanjut Hj. Mimik Idayana, juga menjadi momentum untuk introspeksi dan pengisian ulang spiritual bagi seluruh ASN. Ia berharap, semangat

Hari Santri dapat menjawab setiap langkah ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

"Melalui zikir dan doa bersama hari ini, kita perkuat komitmen untuk menjadi ASN yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga berakhlik mulia, meneladani semangat juang dan keikhlasan para santri," tutur Hj. Mimik Idayana.

Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Sidoarjo ditutup dengan doa bersama dan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara nilai-nilai pesantren dan semangat pelayanan publik demi mewujudkan peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis akhlak mulia. (Khol/dy)



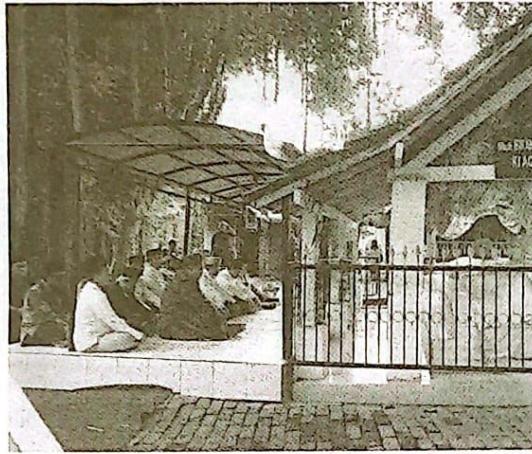
POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Bupati Sidoarjo akan Renovasi Makam Waliyullah Mbah Bungur

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Desa Bungurasih Kecamatan Waru memiliki wisata religi. Di desa yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya itu terdapat makam Syeikh Sayyid Ibrahim Al-Jaelani. Makam yang lebih dikenal dengan nama makam Mbah Ibrahim Al-Jaelani atau Ki Ageng Bungur itu dikeramatkan oleh warga Desa Bungurasih. Nama Mbah Ibrahim Al-Jaelani juga disebut warga Desa Bungurasih sebagai Mbah Bungur atau Mbah Jenggot. Mbah Bungur dipercaya sebagai waliyuloh yang menebar ajaran agama Islam di desa tersebut.

Siang tadi, Jumat, (31/10), Bupati Sidoarjo H. Subandi mendatangi makam Mbah Bungur yang terletak di Jalan Bungurasih Tengah. Kedatangannya juga untuk memenuhi undangan Pemdes Bungurasih yang sedang merayakan Hari Jadi Desa Bungurasih yang ke-1165 tahun ini. Di makam tersebut lantunan doa dipanjatkan. Di tempat tersebut ia tidak hanya datang untuk berziarah. Namun juga menjanjikan warga Desa Bun-



gurasih untuk merenovasi makam Mbah Bungur.

"Inshaalloh makam Mbah Bungur akan kita perbaiki agar peziarah lebih nyaman saat berziarah," ucapnya saat sambutan memperingati Hari Jadi Desa Bungurasih.

Bupati Sidoarjo H. Subandi Mengatakan Bungurasih bukan hanya dikenal sebagai pintu gerbang Sidoarjo. Tetapi juga sebagai desa yang aktif, produktif, dan terus berbenah. Disampaikannya bahwa usia Desa Bungurasih yang sangat panjang adalah bukti nyata-

desa tersebut memiliki sejarah, peran, dan berkontribusi besar dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

"Selaku pimpinan daerah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas eksistensi dan kemajuan yang telah dicapai oleh desa ini," sampainya.

Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi didaulat untuk menandatangani Prasasti Kancana Hari Jadi Desa Bungurasih. Menurutnya prasasti itu sebagai simbol komitmen

bersama untuk menjaga warisan dan semangat pembangunan desa.

"Mari kita jadikan momentum hari jadi ini sebagai titik tolak untuk terus maju, bersatu, dan berinovasi demi Bungurasih yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih sejahtera," ajaknya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi juga berpesan kepada seluruh perangkat desa dan warga Bungurasih untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan ramah.

Ia juga meminta warga untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan perkuat semangat gotong royong. Tidak kalah pentingnya dimintanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, serta mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

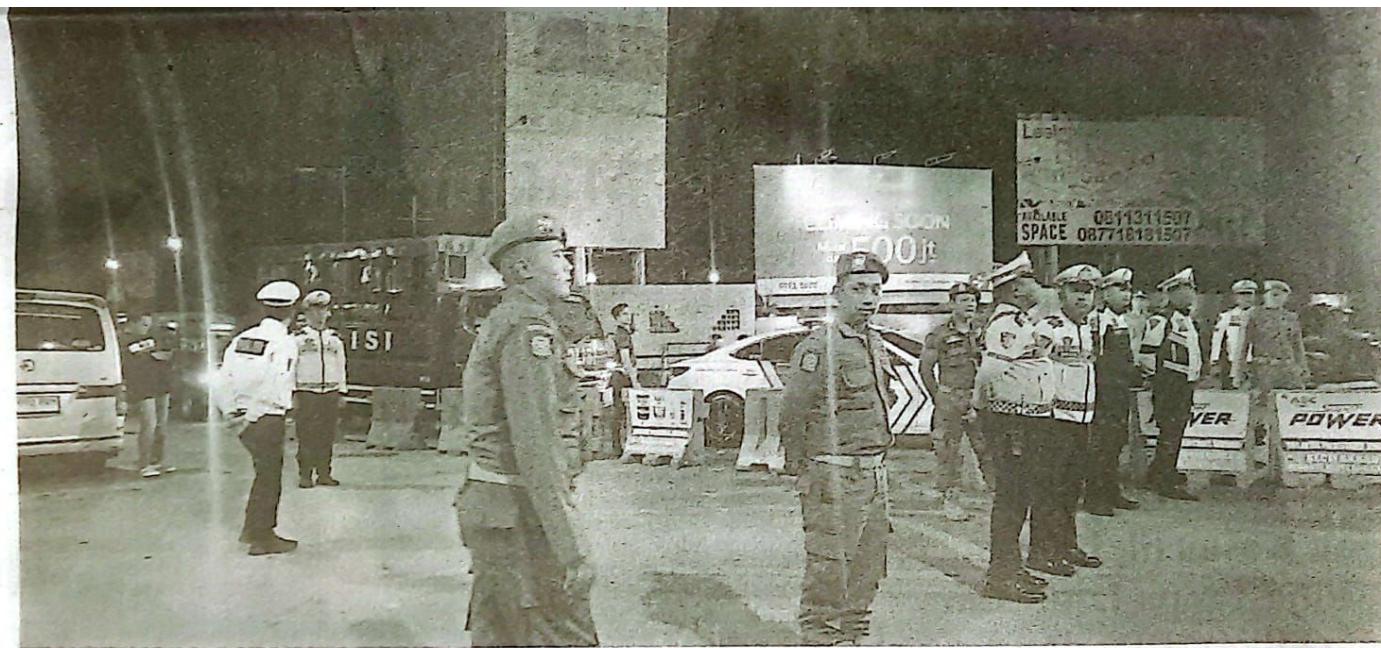
"Selamat hari jadi ke-1165 Desa Bungurasih. Semoga desa ini semakin jaya, warganya semakin makmur, dan tetap menjadi kebanggaan Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Patroli Gabungan di Akhir Pekan untuk Wujudkan Rasa Aman Warga

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Polresta Sidoarjo bersama Kodim 0816 Sidoarjo dan Satpol PP menggelar patroli gabungan, Sabtu (1/11) malam.

Patroli ini menyasar sejumlah titik strategis di pusat

kota Sidoarjo serta kawasan rawan tindak kriminalitas, mulai dari pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga balap liar dan antisipasi terjadinya tawuran antar kelompok.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan di Mako

Polresta Sidoarjo. Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol M. Irfan menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan wilayah Kabupaten Sidoarjo, terutama guna memberikan rasa nyaman masyarakat di saat akhir pekan.

"Patroli kamtibmas ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan tindak kriminalitas," ujar Kompol M. Irfan.

Rute patroli menyusuri pusat kota, Alun-alun, ka-

wasan pertokoan, pemukiman padat penduduk, hingga titik-titik yang sering menjadi lokasi rawan kriminalitas malam hari.

Personel yang bertugas juga berdialog langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi, serta memberikan edukasi terkait keamanan lingkungan. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Normalisasi Sungai Jadi Kunci

► Rumah Pompa Andalan Kurangi Genangan

SIDOARJO, SURYA - Predit sebagai Kota Delta disematkan untuk Sidoarjo karena secara geografis diapit dua aliran sungai besar, yaitu Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan. Keduanya merupakan pecahan dari Sungai Brantas.

Terhitung ada sekitar 48 sungai besar di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Serta ada sejumlah sungai kecil, termasuk jaringan irigasi dan saluran air lainnya. Karakteristik sebagai daerah delta, Sidoarjo secara alami memiliki banyak saluran air dan rentan terhadap banjir, terutama saat curah hujan tinggi atau ketika air laut pasang.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi agar banjir tidak terus terjadi adalah dengan melakukan normalisasi sungai. Pengeringan endapan di sungai besar dan kecil, pengangkatan sampah yang menyumbat aliran sungai, dan sebagainya itu sedang digenjot oleh Pemkab Sidoarjo memasuki musim penghujan ini.

Di antaranya yang sedang berjalan adalah pengeringan Afvour di Desa Candi sampai Kluar yang panjangnya sekitar 1,2 km. Kemudian normalisasi Afvour Trengguli di Desa Kedungkembang Kecamatan Prambon sepan-

STORY HIGHLIGHTS

- Sampah Jadi Pemicu Banjir.
- DLHK Sidoarjo Gelar Ronda dan Pasang CCTV.
- Perketat Pengawasan Pembuangan Sampah Liar.

LIPSUS

ngal-sungai bisa maksimal menampung air saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Dengan begitu, potensi banjir bisa berkurang di Sidoarjo.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Subandi turun langsung memantau proses normalisasi di sejumlah lokasi. Seperti kecamatan, orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu turun langsung memantau proses normalisasi sungai Mbah Gepuk di Kecamatan Candi.

Subandi naik perahu menyusuri sungai Mbah Gepuk dari Balongdowo sampai Kalipecaheun, sekitar 4 km. Dalam kesempatan itu, bupati melihat langsung kondisi sungai yang mengalami pendangkalan.

Di sana juga memantau sejumlah alat berat yang sedang bekerja mengeruk dalam program normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo.

Alat berat bergerak membersihkan lumpur yang mengendap di bawah sungai, serta mengangkat tumbuhan liar yang memenuhi permukaan sungai.

"Kita berusaha terus gerak cepat, ini sudah 1,8 km selesai dilaksanakan normalisasi. Jika kurang maksimal, kita akan tambah alat berat," kata Subandi.

Menurutnya, upaya itu harus dikebut. Apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan. Supaya su-

Tambah Alat Berat

Sekarang ini, ada sembilan alat berat yang sudah beroperasi membersihkan sungai. Jika alat berat tersebut dirasa kurang maksimal, Subandi mengaku akan menambah lagi untuk menambah alat berat.

Bupati menegaskan daerah yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Tanggulangin, Taman Candi dan Porong menjadi prioritas normalisasi. Diharapkan normalisasi bisa tuntas dalam sebulan ke depan.

Sungai Mbah Gepuk kerap menjadi penyebab banjir di kawasan Balonggabus dan Balongdowo, Kecamatan Candi. Utamanya saat musim hujan, sungai yang mengalami pendangkalan tidak mampu menampung air sehingga meluber ke permukaan penduduk.

Ketika banjir terjadi, rumah-rumah warga dan jalan kampung di sana tergenang. "Pernah banjirnya sampai seminggu baru kering," kata M Khofurman, Ketua RT di Desa Balongdowo.

Menurutnya, banjir di sana akibat air sungai meluber. Sungai itu posisinya lebih tinggi dari kampung, potensi air meluber sangat tinggi mengakibatkan banjir.

Pihaknya berharap, pemerintah terus mengambil langkah-langkah strategis



PANTAU - Bupati Sidoarjo, Subandi saat memantau proses normalisasi sungai dan melihat kondisi sungai di sepanjang Kali Mbah Gepuk di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sungai itu menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan sekitar karena mengalami pendangkalan dan banyak tertutup tumbuhan.

untuk mengatasi banjir di sana. Seperti normalisasi sungai dan sebagainya, supaya banjir tidak terjadi.

"Setidaknya banjir tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu lama menggenang di permukaan warga," harapnya.

Dalam upaya normalisasi sungai di berbagai lokasi itu, Bupati Subandi menginstruksikan Dinas PUBMSDA dan camat untuk koordinasi memantau wilayah masing-masing. Ketika ada persoalan seperti banjir dan sebagainya, supaya bisa cepat disikapi dan dicari solusinya.

Pemkab Sidoarjo akan

ringkuhan di wilayahnya masing-masing.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) juga terus melakukan sosialisasi itu. Serta mengawasi di sejumlah titik, mengikap warga yang membuang sampah sembarangan.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan. Utamanya menjaga bersama-sama untuk tidak membuang sampah ke sungai. Supaya tidak terjadi pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai yang berujung terjadinya banjir. (tmt)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

JADI KELUHAN: Tumpukan sampah pinggir Jalan KH. Ali Mas'ud, Buduran, yang memunculkan bau tak sedap. Lokasi itu merupakan salah satu titik rawan pembuangan sampah.

ALAT PANTAU: CCTV
milik DLHK Sidoarjo
di kawasan Jl. KH.
Ali Mas'ud, Buduran,
yang dipakai untuk
memotret pembuangan
sampah sembarangan.
Ada 14 CCTV serupa
yang tersebar di seluruh
kabupaten.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Awasi Pembuang Sampah Sembarangan, DLHK Maksimalkan CCTV di 15 Titik

SIDOARJO - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan masih rendah. Buktinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo masih menemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ke depannya, tingkat pengawasan bakal diperketat dengan mengandalkan Closed-Circuit Television (CCTV) yang tersebar di 15 titik.

Kepala DLHK Sidoarjo Bahru Amiq mengatakan, pengawasan berbasis teknologi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. "Dari pantauan CCTV, pelanggar bisa ditindaknantinya," kata Amiq.

Menurutnya, pengawasan ini bukan sekadar langkah

represif. Namun juga bagian dari edukasi lingkungan secara nyata. Dari data, kata Amiq, sebagian besar pelanggar yang sebelumnya sempat terjaring kebanyakan justru bukan warga Sidoarjo.

"Hanya 10 persen asli Sidoarjo. Kebanyakan orang luar domisili sini atau usaha warung disini," jelasnya. Dia menyebut jika lokasi pembuangan sampah liar banyak terjadi di area exit tol Tanggulangin, Jalan Lingkar Timur sisi Candi, Jalan KH. Ali Mas'ud di Buduran, serta area Sidodadi Candi.

DLHK bersama Satpol PP bakal menindak tegas pelaku dan memberikan sanksi berupa tipiring. Selain pengawasan, DLHK juga mengandeng desa dan kecamatan untuk memperkuat penegakan di lapangan. (eza/hen)

Jawa Pos

Delapan RS Belum Bermitra dengan BPJS Kesehatan

Berpotensi Mengganggu Layanan di Faskes

SIDOARJO - Belum semua rumah sakit (RS) di Sidoarjo bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari 32 RS, baru 24 fasilitas kesehatan (faskes) yang membuka pelayanan untuk pasien BPJS. Pemkab mendorong seluruh RS untuk bekerja sama agar tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes)



JADI CONTOH: IGD RSUD R.T. Notopuro menangani pasien BPJS Kesehatan. Seluruh RS diharapkan bekerja sama dengan instansi tersebut agar mempermudah pelayanan.

Sidoarjo dr Danang Abdul Ghani menjelaskan beberapa rumah sakit belum

bergabung karena merasa memiliki pangsa pasar berbeda. Sebagian telah menja-

lin kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta. "Ada rumah sakit yang memilih fokus ke kerja sama dengan asuransi lain atau perusahaan mitra," jelas Danang.

Menurutnya tahun ini ada penambahan RS yang telah bekerja sama dengan BPJS. Kerja sama antara BPJS dan RS Anwar Medika kembali terjalin pada pertengahan tahun 2025. "Ini menambah jumlah rumah sakit yang bisa melayani peserta BPJS di Sidoarjo," katanya.

Dengan jumlah 24 rumah sakit yang sudah bermitra,

Dinkes menilai fasilitas tersebut masih mampu menangani pasien rujukan dari puskesmas atau faskes tingkat pertama (FKTP). "Kapasitas rumah sakit yang bermitra masih cukup untuk menampung rujukan pasien dari wilayah Sidoarjo," ujarnya.

Tentu, Danang berharap jumlah rumah sakit mitra BPJS terus bertambah. Salah satunya yang akan didorong yakni RSUD Sedati yang kini masih dalam tahap pembangunan. "RSUD Sedati akan memperkuat pelayanan rujukan," tuturnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Soroti Anggaran Pendidikan yang Berkurang Setengah Triliun

Minta Pemkab
Lebih Cermat
Menata APBD 2026

SIDOARJO - DPRD Sidoarjo menyoroti alokasi anggaran untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang nilainya turun cukup drastis. Dari Rp 1,5 triliun pada tahun ini, anggaran turun 37,7 persen menjadi Rp 954 miliar pada tahun depan.

Jubir Fraksi Golkar Wahyu Lumaksono menyatakan, penurunan anggaran yang nilainya lebih dari setengah triliun itu merupakan bentuk kemunduran terkait program pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terlebih, nilai tersebut hanya 18,6 persen dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 5,13 triliun. "Di bawah ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945," ujarnya kemarin (2/11).

Wahyu menuturkan, anggaran pendidikan bukan sektor yang bisa dipangkas seenaknya. Sebab itu berkaitan dengan masa depan generasi bangsa. "Kami mendesak pemkab agar mengembalikan alokasi anggaran pendidikan

sesuai dengan ketentuan konstitusi," katanya.

Lebih lanjut, dia memaparkan, anggaran belanja daerah tahun depan memang menurun 13,7 persen. Dari sebelumnya Rp 5,94 triliun menjadi Rp 5,13 triliun. Meski begitu, Pemkab diharapkan lebih cermat dalam menata anggaran.

Wahyu mengungkapkan, pihaknya menemukan beberapa persoalan dalam perencanaan. Anggaran untuk kegiatan yang dianggap non prioritas justru meningkat.



Kami mendesak pemkab agar mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan konstitusi."

Wahyu Lumaksono
Jubir Fraksi Golkar

Di sisi lain, layanan dasar publik terpangkas.

Dia mengambil contoh anggaran rapat koordinasi (rakor) mencapai Rp 11 miliar. Tetapi, BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat

hanya senilai Rp 1,1 miliar. "Turunnya anggaran belanja semestinya tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar," paparnya. Wahyu juga menilai target



SUMBER: RAPAT PARIPURNA APBD 2026
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan kurang realistik. Beberapa pos pendapatan lebih rendah dari sebelumnya. Misalnya, pajak air tanah, hotel, dan parkir. Kondisi itu dinilai bukti lemahnya perencanaan pendapatan. Pemkab diminta agar merevisi target PAD. "Bagi kami persoalan efisiensi bukan memangkas pelayanan publik," tandasnya. (edi/hen)

Pertanyakan Dana Pengembalian Sisa Bantuan di Belanja Tak Terduga

SEMENTARA itu, laporan APBD tahun 2024 juga tak luput dari koreksi. Muncul kritik terkait pengembalian sisa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD serta bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim yang masuk belanja tak terduga (BTT).

Merujuk Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2024, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,3 miliar. Kebijakan itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 69 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Yakni, BTT hanya dapat digunakan untuk keadaan darurat, bencana alam, atau kejadian tidak terduga yang membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Untuk mengeluarkannya juga perlu penepatan status darurat. "Kami menilai pengembalian dana BOP dan BKK itu bukan darurat. Namun tanggung jawab administratif. Kenapa dimasukkan

BITT?" kata Direktur Lembaga Kajian Anggaran Publik (LKAP) Jatim Rendra Wahyu kemarin (2/11).

Kami menilai pengembalian dana BOP dan BKK itu bukan darurat. Namun tanggung jawab administratif. Kenapa dimasukkan

Nur Aisyah, pengamat tata kelola publik dari Forum Transparansi Anggaran (Forta) menilai kebijakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan diskresi kepala daerah. BTT, lanjutnya, bukan dompet untuk keperluan serbaguna.

Di sisi lain, pemkab belum memberi tanggapan terkait kritikan itu. Sekretaris Dae-rah Fenny Apridawati belum memberi jawaban saat dikonfirmasi. Pun Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. (edi/eza/hen)

Jawa Pos

Bentuk Tanggung Jawab Moral



Keluarga santri korban tragedi runtuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny menyambut haru santunan dari Bupati Sidoarjo Subandi.

CS Dipindai dengan CamScanner

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi menyerahkan bantuan kepada enam keluarga korban meninggal akibat musibah runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran. Bantuan diserahkan dengan mendatangi setiap rumah korban.

Enam keluarga penerima bantuan tersebut yakni keluarga Mohammad/Abdul Rohman Nafis asal Sedati, keluarga M Muhib Alfian dari Buduran, keluarga M Rizki Maulana Saputra dari Buduran, keluarga Fairuz Shirojuddin dari Tulangan, keluarga Irham Ghifari dari Krian, serta keluarga M Adam Fidiansyah dari Sukodono.

Bupati menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang terjadi. "Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu tabah. Ananda-ananda yang sudah almarhum ini merupakan pahlawan santri kita, berjuang di pondok pesantren dan meninggal dalam keadaan syahid," ucapnya usai menyerahkan bantuan itu pada Sabtu (1/11).

Bantuan itu berasal dari Pemkab Sidoarjo bersama Baznas berupa santunan sebesar

Rp10 juta untuk setiap keluarga korban. Selain itu, pekan depan juga akan disalurkan bantuan pembangunan untuk Ponpes Al Khoziny senilai Rp 1 miliar. "Ini bentuk tanggung jawab moral kita semua. Kami ingin pondok segera bangkit dan kembali beraktivitas agar anak-anak bisa kembali belajar dengan aman," ujarnya.

Jayanti Mandasari ibunda almarhum M Muhib Alfian, menyampaikan keikhlasannya atas kepergian sang buah hati. "Mugi-mugi anak saya husnul khatimah dan bahagia di surga. Sejak mondok, perubahannya bagus sekali. Saya ikhlas, saya rida karena dikasih istimewa sama Allah SWT. Nggak semua orang meninggal dalam keadaan sujud dan suci," tuturnya dengan linilan air mata. (san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana membuka Run and Camp 2025.

Event Run and Camp 2025 Jadi Promosi Wisata dan Ekonomi.

Sidoarjo, Memorandum

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menyebut *event* Run and Camp 2025 yang digelar Minggu (2/11), berperan sebagai ajang promosi wisata dan penggerak ekonomi masyarakat. Kegiatan yang menggabungkan olahraga lari dan perkemahan ini menjadi inovasi baru menarik wisatawan.

"Event ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga cara kreatif memperkenalkan potensi wisata dan ekonomi lokal kita. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut di berbagai wilayah Sidoarjo," ujar Mak Mimik, sapaan akrabnya saat membuka lomba.

Digagas Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, *event* ini digelar di Bumi Perkemahan Pramuka, Desa Tanjekwagir, Kecamatan Kreembung. Diikuti peserta tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Kepala Disporapar Yudhi Irianto menjelaskan, Run and Camp 2025 merupakan *event* pertama di Sidoarjo yang memadukan aktivitas perkemah dan lari jarak jauh. "Tanjekwagir dipilih karena memiliki bumi perkemahan yang luas. Peserta bisa menginap langsung di lokasi *start* tanpa harus mencari penginapan lain," ujarnya.

"Antusias masyarakat dalam event ini sangat besar yaitu mencapai 1.000 peserta yang Run and Camp 2025 untuk kategori 5 km, 10 km, dan 21 km dan saya harap tahun depan acara ini dapat terlaksana kembali," tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda-kab Mahmud menyampaikan, kegiatan ini memiliki nilai positif, baik dari segi promosi wisata maupun peningkatan kebugaran masyarakat. "Agar tidak terpusat di kota saja, Namun menyebar di seluruh tempat-tempat wisata di Sidoarjo," ujarnya. (kri/san/epe)

Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Bahas Revisi Pajak dan Retribusi, Fraksi Tekankan Keadilan Fiskal dan Transparansi



SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama pada Sabtu (1/11/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, dan turut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., bersama 25 anggota dewan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, dua fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem.

Fraksi Gerindra Tekankan Penyesuaian Regulasi dan Prinsip Keadilan

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Bambang Pujianto, menyampaikan apresiasi kepada Bupati atas penyerahan naskah akademik Raperda pada 25 Oktober 2025 lalu. Ia menilai revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional serta hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Penyesuaian ini perlu agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi lebih efektif, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga harus disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," ujar Bambang dalam penyampaiannya.



Gerindra juga menyoroti beberapa poin strategis, di antaranya:

- Dukungan terhadap perubahan Pasal 15 ayat (7) dan (8) terkait nilai objek tidak kena pajak dari hibah, wasiat, atau waris tertentu.
- Penyesuaian Pasal 40 agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 81, untuk memastikan pengenaan pajak yang proporsional.
- Penataan ulang struktur retribusi dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah potensi pungutan liar di 14 OPD pengelola retribusi.
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bambang menegaskan bahwa penerapan pajak dan retribusi harus berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan ekonomi sesuai ajaran Islam.

"Pajak dan retribusi daerah tidak boleh menjadi beban berlebih bagi masyarakat, tetapi justru menjadi instrumen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai NasDem, Dimas Muh Zakaria Dimas Pratama, menyoroti pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar berinovasi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor produktif, tidak semata mengandalkan pajak dan retribusi yang sudah ada.

"Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan," ujarnya.

Menanggapi pandangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem atas masukan konstruktif yang diberikan.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, kami mengucapkan terima kasih kepada kedua fraksi atas pandangan umum yang komprehensif. Catatan penting yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan bersama pihak eksekutif pada tahap berikutnya," ungkapnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi kepada pimpinan dewan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat gabungan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi tersebut.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo Kompak Lepas Ribuan Peserta "Mlaku Bareng Santri"



SIDOARJO – Suasana penuh semangat dan kebersamaan tampak menyelimuti kawasan Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo pada Minggu pagi (2/11/2025).

Ribuan warga tumpah ruah mengikuti rangkaian kegiatan Doa Bersama, Mlaku Bareng Santri, serta Festival UMKM 2025 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, bersama unsur Forkopimda. Keduanya terlihat akrab menyapa peserta dan secara simbolis melepas ribuan santri yang ikut dalam kegiatan jalan santai mengelilingi kota.

Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa Mlaku Bareng Santri bukan sekadar kegiatan olahraga, melainkan wadah mempererat persatuan dan menggugah semangat gotong royong di tengah masyarakat Sidoarjo.

"Mlaku Bareng Santri adalah wujud kebersamaan dan semangat perjuangan. Sementara Festival UMKM menjadi bukti bahwa ekonomi rakyat tumbuh dari bawah dari inovasi dan kreativitas masyarakat," ujar Subandi.

Ia juga menyoroti peran penting santri dalam pembangunan daerah. Menurutnya, santri masa kini tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga harus tangguh di bidang sosial, ekonomi, dan kewirausahaan.

"Hari Santri menjadi momentum bagi para santri untuk berdakwah, berinovasi, dan berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo yang semakin maju dan sejahtera," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai peringatan Hari Santri dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.



"Kami dari DPRD memberikan apresiasi luar biasa. Kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri," ujarinya.

Abdillah menambahkan, kegiatan yang melibatkan ribuan peserta serta pelaku UMKM ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kebersamaan seperti ini akan menjadi energi positif bagi kemajuan Sidoarjo ke depan," pungkasnya.

Kemeriahannya acara Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025 berlangsung hingga siang hari. Selain doa bersama dan jalan sehat, masyarakat juga antusias berbelanja di bazar produk unggulan UMKM lokal yang menampilkan berbagai hasil karya kreatif warga Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Hadiri Do'a Bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025



Sidoarjo – Ribuan peserta memadati kawasan Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo Minggu pagi (2/11). Kegiatan Doa Bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025 digelar meriah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, Abdullah Nasih.

Mengawali acara, Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Radar Sidoarjo atas kontribusi dan kolaborasinya. Baginya media lokal Radar Sidoarjo memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

“Kami dari DPRD Sidoarjo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Radar Sidoarjo, bukan hanya melalui pemberitaan, tapi juga lewat aksi nyata seperti kegiatan Hari Santri ini,” katanya.

“Kami berharap, kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan media terus terjalin, kami yakin ini dapat memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri,” pungkasnya.

Selanjutnya Bupati Sidoarjo, Subandi juga hadir dan secara resmi memberangkatkan peserta Mlaku Bareng Santri. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan semangat perjuangan para santri.

Dia mengatakan, Mlaku Bareng Santri bukan sekadar kegiatan jalan sehat. Namun juga momentum memperkuat persatuan dan menumbuhkan semangat gotong royong.

“Mlaku bareng santri adalah simbol kebersamaan dan semangat perjuangan, festival UMKM menjadi bukti bahwa ekonomi kerakyatan tumbuh dari bawah, dari tangan-tangan kreatif masyarakat kita,” ucapnya saat sambutan.

Menurutnya, santri masa ini tak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Dia menekankan bahwa santri sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi membangun Kota Delta.

“Hari Santri ini menjadi momentum bagi para santri untuk berdakwah, berwirausaha, dan membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan terang,” ujarnya.

Bupati juga mengajak masyarakat meniaga semangat persatuan dalam membangun daerah. Dia menegaskan, kemajuan Sidoarjo menjadi tanggung jawab bersama.

“Jangan saling meniatubkan, tetapi saling menguatkan, jangan hanya menuntut, tapi mari ikut berbuat yang baik,” terasnya.

Subandi menilai kegiatan yang digagas Radar Sidoarjo ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Melalui Festival UMKM, masyarakat diajak mendukung produk usaha kecil dan menengah. pungkasnya. (dah/*)





Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna II dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sabtu (1/11).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdilah Nasih, S.M., dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., jajaran Forkopimda, serta 26 anggota DPRD, berlangsung di ruang rapat utama DPRD Sidoarjo.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Sidoarjo menyampaikan pandangan umum terhadap raperda perubahan pajak dan retribusi daerah. Pandangan fraksi-fraksi dibacakan oleh jucu bicara bersama, H. Bambang Pujiyanto, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Cak Bambang Puji.

Dalam pandangannya, Cak Bambang Puji menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda tersebut sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah.

“Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Cak Bambang Puji dalam penyampaian resmi pandangan umum fraksi.

Ia menegaskan bahwa sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah, perubahan ini harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Cak Bambang Puji juga menyinggung bahwa dalam perspektif Islam, konsep pajak dan retribusi memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai sariyah, khususnya pada tujuan perlindungan harta (hifdzul mal) yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam naskah pandangan umum itu, fraksi-fraksi menyoroti beberapa pasal penting dalam rancangan perubahan perda, di antaranya:





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 15 ayat (7) dan (8), yang mengatur tentang nilai objek tidak kena pajak untuk perolehan hak karena hibah atau waris, sebelumnya ditetapkan sebesar Rp250 juta. Ketentuan ini dihapuskan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap Pasal 46 ayat (6) dan Pasal 47 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 40, dilakukan penyesuaian redaksi agar selaras dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga klausulnya kini mengatur secara spesifik mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Fraksi-fraksi juga menekankan bahwa struktur retribusi daerah perlu diperbarui dengan prinsip efisiensi dan transparansi Pengelolaan data retribusi, terutama pada fungsi data usaha dan retribusi perizinan tertentu yang tersebut di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus dilakukan secara terintegrasi agar terhindar dari praktik pungutan liar dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Selain itu, fraksi-fraksi mendorong agar pemanfaatan aset daerah dilakukan secara akuntabel tidak menambah beban masyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan. Pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi harus berorientasi pada keberlanjutan.

Menutup penyampaian pandangan umum, juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan harapan agar seluruh masukan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan daerah.

"Kami berharap pandangan umum ini menjadi masukan yang konstruktif demi kebaikan seluruh masyarakat Sidoarjo. Semoga setiap keputusan yang diambil membawa manfaat berkelanjutan, kesejahteraan merata, dan semangat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan adil," ujar Cak Bambang Puji mengakhiri penyampaian pandangan umum fraksi.

Rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD H. Abdilah Nasih, setelah seluruh agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi selesai disampaikan (Ryo)



Fraksi PDIP Sidoarjo Desak Pemkab Rancang Program Inovasi Genjot PAD Lewat Perubahan Perda Pajak dan Retribusi



Sidoarjo (republikjatim.com) - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sidoarjo mendadak Pemkab Sidoarjo untuk membuat inovasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama, melalui adanya usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo berasaskan pentingnya inovasi dalam mendongkrak PAD melalui prinsip keadilan dalam implementasi perda baru ini.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Didik Prasetyo mengatakan penyusunan Raperda ini menjadi tindak lanjut wajib atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kedua regulasi ini mewajibkan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang terintegrasi.

"Raperda tentang Perubahan atas Perda 1 Tahun 2024 ini menjadi pembaruan yang terintegrasi berdasarkan evaluasi kementerian dan usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, penyesuaian ini harus menyasar berbagai sektor strategis mulai dari pelayanan publik, kesehatan, lingkungan hingga fasilitas usaha mikro dan pariwisata," ujar Didik Prasetyo kepada republikjatim.com, Minggu (02/11/2025).

Karena itu, lanjut Didik Fraksi PDI Perjuangan mengajukan beberapa permintaan dan penekanan kepada Pemkab Sidoarjo. Diantaranya soal inovasi pendapatan daerah. Menurut Didik Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Sidoarjo melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) untuk lebih mampu melakukan berbagai inovasi terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sisi pajak dan retribusi itu.

"Program inovasi pajak dan retribusi ini sejalan dengan yang telah ditetapkannya dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2023," ungkap



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

politisi PDI Perjuangan asal Dapil III meliputi wilayah Kecamatan Tulangan, Wonoayu, Prambon dan Kecamatan Krembung ini.

Selain itu, Didik menambahkan dalam inovasi peningkatan PAD juga harus mempertimbangkan azas keadilan dan pemerataan beban. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Raperda Pajak dan Retribusi ini dapat menciptakan keadilan dan pemerataan beban pajak daerah dan retribusi daerah.

"Hal itu, dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi daerah," pinta anggota dewan yang sudah menjabat dua periode ini.

Tidak hanya itu, Didik juga mengingatkan agar tetap ada unsur kepatuhan pada regulasi pemerintah pusat. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan perubahan Raperda ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada di tingkat pusat. Harapannya, agar menjadi Perda yang berkeadilan, transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya.

"Kalau bisa sekaligus mendukung optimalisasi PAD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," tegas polisi PDI Perjuangan yang berasal dari wilayah Kecamatan Tulangan ini.

Namun demikian, Didik juga tetap mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo dalam mengajukan Perubahan Raperda Pajak dan Retribusi itu.

"Kami (Fraksi PDI Perjuangan) juga menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Pemkab Sidoarjo ini. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah-langkah Pemkab Sidoarjo dalam menyusun Raperda ini sebagai respon cepat atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI," jelas Didik yang juga tercatat sebagai anggota Komisi B DPRD Sidoarjo ini.

Bahkan, apresiasi ini diberikan karena upaya Pemkab Sidoarjo yang dinilai mampu menciptakan sistem perpajakan daerah yang adaptif, akuntabel dan selaras dengan kebijakan nasional.

"Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan menilai dokumen Raperda ini sebagai dasar kuat untuk kebijakan retribusi daerah yang lebih efektif dan adaptif, asalkan prinsip inovasi, keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan utama implementasinya," pungkasnya. Ary/Waw



Bupati Subandi dan Ketua DPRD Nasih Lepas Ribuan Peserta Mlaku Bareng Santri



Zonajatim.com, Sidoarjo – Ribuan peserta memadati kawasan Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, Minggu pagi (2/11). Kegiatan Doa Bersama, Mlaku Bareng Santri dan Festival UMKM 2025 digelar meriah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Abdillah Nasih hadir dan secara resmi memberangkatkan peserta Mlaku Bareng Santri. Kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan dan semangat perjuangan para santri.

Dia mengatakan, Mlaku Bareng Santri bukan sekadar kegiatan jalan sehat. Namun juga momentum memperkuat persatuan dan menumbuhkan semangat gotong royong. "Mlaku bareng santri adalah simbol kebersamaan dan semangat perjuangan, festival UMKM menjadi bukti bahwa ekonomi kerakyatan tumbuh dari bawah, dari tangan-tangan kreatif masyarakat kita," ucapnya saat sambutan.

Menurutnya, santri masa ini tak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Dia menyebut santri sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi membangun Kota Delta. "Hari Santri ini menjadi momentum bagi para santri untuk berdakwah, berwirausaha, dan membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju dan terang," ujarnya.

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati juga mengajak masyarakat menjadi semangat persatuan dalam membangun daerah. Dia menegaskan, kemajuan Sidoarjo menjadi tanggung jawab bersama. "Jangan saling menuntut, tetapi saling menguatkan, jangan hanya menuntut, tapi mari ikut berbuat yang baik," tegasnya.

Subandi mulai kegiatan yang digagas Radar Sidoarjo ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Melalui Festival UMKM, masyarakat diajak mendukung produk usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memberikan apresiasi kepada Radar Sidoarjo atas kontribusi dan kolaborasinya. Baginya media lokal Radar Sidoarjo memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. "Kami dari DPRD Sidoarjo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Radar Sidoarjo, bukan hanya melalui pemberitaan, tapi juga lewat aksi nyata seperti kegiatan Hari Santri ini," katanya.

"Kami berharap, kerja sama antara pemerintah, DPRD, dan media terus terjalin, kami yakin ini dapat memperkuat identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri," pungkasnya. Tm

meningkat 13,65%. Kami memahami bahwa faktor kenaikan signifikan pada tahun 2025 tersebut diantaranya disebabkan adanya penambahan pendapatan dari opsen PKB.

"kami juga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Sekaligus pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PA"

Ia juga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PAD.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PAD. Harap Zakari Dari Fraksi Nasdem. (jun)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fraksi Demokrat NasDem DPRD Sidoarjo Apresiasi Penyusunan APBD 2026

Sebagai Kebijakan



SIDOARJO (Wartatransparansi.com)-Fraksi Demokrat NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Muh Zakaria Dimas Pratama, S.I.Kom. Dalam sidang rapat Paripurna (1/11) tentang Raperda dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2026

Fraksi Demokrat NasDem zakaria menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal utama daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinkronisasi program daerah dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Namun demikian, setelah mencermati secara seksama dokumen raperda APBD tahun anggaran 2026, fraksi Demokrat NasDem memberikan beberapa catatan, penilaian, dan rekomendasi strategis sebagai berikut.

Satu. Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.727.610.888. Rp8.931 mengalami penurunan sebesar Rp703.965.960.438 atau 12,96% bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer sebesar Rp2.756.871.000. Rp1.295.660 menjadi Rp2.8.222.962.000.

Muh zakaria juga menerangkan pendapatan asli daerah PAD Fraksi Demokrat NasDem mengapresiasi peningkatan PAD yang direncanakan sebesar Rp2,7 triliun atau naik 1,67% dari tahun sebelumnya. Ujarnya

Namun, fraksi menilai bahwa target kenaikan tersebut terlalu konservatif. Bahkan cenderung pesimis jika dibandingkan dengan pertumbuhan PAD tahun 2025 yang



meningkat 13,65%. Kami memahami bahwa faktor kenaikan signifikan pada tahun 2025 tersebut diantaranya disebabkan adanya penambahan pendapatan dari opsi PKB.

"kami juga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Sekaligus pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PA'

Ia juga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PAD.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih optimis dan progresif dalam mengelola potensi fiskal daerah melalui intensifikasi sumber PAD. Harap Zakari Dari Fraksi Nasdem. (jun)

